



Judul : Sebar Vaksin Secara Merata
Tanggal : Sabtu, 24 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Harapan Komisi VI DPR **Sebar Vaksin Secara Merata**

REALISASI vaksinasi Covid-19 dinilai masih jauh dari target pemerintah. Berdasarkan data vaksinasi Covid-19 per 21 Juli 2021, baru 42,6 juta jiwa yang mendapatkan vaksin dosis pertama. Sedangkan 16,6 juta jiwa mendapat vaksin Corona dosis kedua dengan target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208,2 juta jiwa.

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina bilang, proses vaksinasi masih terlalu lambat, baik dari jumlah maupun pemerataannya. Suplai vaksin lebih fokus untuk wilayah Jawa-Bali. Itu menyebabkan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali mengalami kekurangan vaksin.

"Perlu ada perubahan tindakan dari kebijakan ini sehingga ada pemerataan pengendalian pandemi ini melalui vaksin di seluruh Indonesia secara merata," tutur Nevi dalam keterangan persnya, kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, pemerintah yang menargetkan terjadinya kekebalan komunal atau *herd immunity* dengan melakukan vaksinasi. Namun, sayangnya target tersebut tidak diikuti dengan pemerataan suplai vaksin di seluruh wilayah Indonesia.

Dia mengutip data yang dipublikasikan oleh Juru Bicara Vaksinasi dari Bio Farma, hingga 15 Juli 2021 jumlah vaksin yang telah didistribusikan sebanyak 73.679.100 dosis.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.663.759 dosis di antaranya diberikan kepada daerah di Jawa-Bali. Sementara 22.481.590 dosis lainnya disebar ke seluruh daerah di luar Jawa-Bali.

Nevi bilang, sebagai dugaan

awal, kondisi ketimpangan ini tentunya dapat menyebabkan terhambatnya program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

"Di Sumatera Barat misalnya, untuk mencapai herd immunity dibutuhkan sekitar 4 juta dosis vaksin, tapi yang diterima Pemerintah Daerah Sumatera Barat baru sekitar 1 juta dosis saja," ujarnya.

Nevi menyarankan, Pemerintah Pusat mesti meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dan relasi dengan Pemerintah Daerah pada persoalan penanganan pandemi ini. Pemerintah seharusnya bisa menggandeng Pemerintah Daerah untuk memastikan suplai vaksin dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.

"Karena itu amanah Pasal 25 Undang-Undang Perdagangan. Permasalahannya, apa yang selama ini menjadi kendala mesti dapat solusi. Jangan sampai ada penimbunan vaksin di beberapa wilayah," katanya.

Legislator asal Sumatera Barat ini menjelaskan, beberapa persoalan ketersediaan vaksin yang terbatas tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksinasi. Semua kebijakan yang diimplementasi pada tindakan di lapangan mesti tertata dengan baik, termasuk memperhatikan aspek segmentasi penerima vaksin.

Pemerintah, lanjutnya, perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program vaksinasi ini, demi percepatan penyelesaian pandemi yang sudah cukup lama di Indonesia. Setiap detail, mulai dari hulu hingga hilir harus diperhatikan. ■ ONI